

KUDETA MYANMAR : JUNTA MILITER DI ERA MODERN

Faustina Ivana S.D.J, Euneke Dewi T, Fiki Rahmatina N

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UPN "Veteran" Yogyakarta

Abstrak

Munculnya demokrasi dalam sistem pemerintahan suatu negara merupakan sebuah hal yang umum terjadi pada era modern. Namun, hal tersebut tidak terjadi di Myanmar sebab kekuatan militer masih menguasai negara ini dalam waktu yang panjang. Usaha penerapan demokrasi di Myanmar beberapa kali dilakukan, tetapi menemui hambatan karena pengaruh militer yang kuat. Proses demokratisasi yang mengalami kegagalan akibat dominasi militer menyebabkan demokrasi sulit untuk sepenuhnya diterapkan.

Artikel ini akan menjelaskan kudeta militer pada tahun 1962 – 1988 yang menyebabkan penderitaan bagi rakyat Myanmar. Pengalaman buruk di bawah pemerintahan militer membuat masyarakat Myanmar memperjuangkan demokrasi melalui serangkaian proses demokratisasi sejak tahun 1990 hingga akhirnya berhasil memiliki pemerintahan sipil pertama pada tahun 2015. Berhasilnya penerapan demokrasi sejak tahun 2015 tidak menutup kemungkinan adanya kudeta yang dilakukan oleh pihak militer, seperti yang terjadi pada Februari 2021 yang lalu. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha untuk menerapkan nilai – nilai demokrasi bukanlah hal yang mudah.

Kata Kunci: Demokratisasi, Demokrasi, Kudeta, Myanmar.

Abstract

The emergence of democracy in the system of government of a country is a common occurrence in the modern era. But, this is not the case in Myanmar because military forces still control the country for a long time. Efforts to implement democracy in Myanmar were several times carried out, but encountered obstacles due to strong military influence. The process of democratization that failed due to military dominance made it difficult for democracy to be fully implemented.

This article will explain the military coup in 1962 – 1988 that caused suffering for the people of Myanmar. Poor experience under military rule led Myanmar people to fight for democracy through a series of democratization processes from 1990 until finally succeeding in having the first civilian government in 2015. The successful implementation of democracy since 2015 does

not close the possibility of a coup by the military, as happened in February 2021. Thus, it can be concluded that efforts to apply democratic values are not easy.

Keywords: *Democratization, Democracy, Coup, Myanmar.*

PENDAHULUAN

Dalam waktu yang singkat, pihak militer kembali mengambil alih pemerintahan Myanmar. Kudeta yang dimulai pada 1 Februari 2021 yang lalu merupakan awal dari kembalinya militer pada tampuk kekuasaan Myanmar. Bukan untuk yang pertama kalinya, hal serupa sebelumnya pernah dialami Myanmar tepatnya pada Maret 1962. Kala itu kudeta militer di bawah komando Jenderal Ne Win dilakukan terhadap pemerintahan sipil pertama sejak negara tersebut mendapatkan kemerdekaannya. Kudeta dilakukan dengan alasan pemerintah yang berkuasa di bawah pimpinan Perdana Menteri U Nu gagal mempertahankan keutuhan negara sebab terdapat banyak permasalahan seperti konflik etnis di mana terjadi pemberontakan oleh etnis - etnis yang menyebabkan kekhawatiran akan perpecahan bangsa yang baru saja terbentuk ini. Tidak hanya itu, masalah pada lembaga pemerintahan seperti korupsi dan kegagalan untuk menjaga kestabilan ekonomi juga menjadi penyebab dilakukannya kudeta oleh pihak militer.

Kudeta yang terjadi 59 tahun yang lalu ini merupakan bagian dari sejarah penting bangsa Myanmar dalam memperjuangkan demokrasi. Berbeda dengan kudeta sebelumnya, alasan utama kudeta militer yang terjadi pada 1 Februari yang lalu adalah tuduhan kecurangan yang terjadi pada Pemilu yang diselenggarakan November 2020. Hal ini menyebabkan kemarahan dari masyarakat sipil Myanmar dan menuntut agar pihak militer segera mengembalikan kekuasaan kepada pemerintah yang terpilih. Kudeta ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat akan kembalinya kekuasaan pemerintah otoriter dan hilangnya demokrasi. Kekhawatiran ini bukannya tanpa dasar, sebab pihak militer nampak enggan mengembalikan kekuasaan kepada pemerintahan terpilih, terus melakukan penangkapan para tokoh politik nasional, serta bersikap agresif terhadap pergerakan anti-kudeta yang dilakukan oleh masyarakat sipil.

Sejak pengakuan terhadap hasil pemilu pada 2012 lalu yang merupakan bukti dari hadirnya demokrasi di negara ini kenyataan atas kudeta yang terjadi dinilai merusak jalannya demokrasi yang tengah berkembang di Myanmar dan berpotensi mengembalikan kekuatan junta militer. Hadirnya kekuatan militer pada politik Myanmar adalah sebuah bentuk gangguan terhadap implementasi dan konsolidasi dari proses demokrasi yang ada (Keling & Utara, 2010, p. 133). Perkembangan kehidupan demokrasi di Myanmar merupakan sebuah hal berharga yang ingin terus dipertahankan oleh masyarakat sipil Myanmar. Dalam penulisan ini, akan fokus terhadap pembahasan tentang terulang kembali nya sejarah junta militer di Myanmar dan melemahnya demokrasi pada era modern.

KONSEP DEMOKRASI DAN DEMOKRATISASI

Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih dikenal sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi sendiri selalu dikaitkan dengan pemerintahan yang mengutamakan rakyatnya. Namun, pandangan mengenai pelaksanaan demokrasi berbeda di setiap negara penganutnya. Pandangan yang berbeda itu menjadi indikator dalam pelaksanaan demokrasi di suatu negara. Dalam pelaksanaan tersebut juga akan mengalami perubahan-perubahan proses demokrasi yang bergantung dari sistem politik yang dianut negara.

Dapat dikatakan demokrasi sampai saat ini dipandang sebagai sistem politik dan cara pengaturan kehidupan bernegara terbaik. Implementasi demokrasi salah satunya melalui kebebasan mengemukakan pendapat, berserikat, dan berkumpul. Kebebasan mengemukakan pendapat merupakan salah satu hak individu yang perlu diperjuangkan. Suatu negara belum dikatakan demokratis kalau masyarakat dan elemen-elemen yang ada di negara tersebut masih sulit untuk mengemukakan pendapatnya.

Pada tahun 1942, teori demokrasi klasik didefinisikan oleh Joseph Schumpeter dengan istilah "kehendak rakyat" sebagai sumbernya dan "kebaikan bersama" sebagai tujuannya. Kemudian, definisi tersebut berubah menjadi "metode demokratis" yakni prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya terdapat individu yang memperoleh kekuasaan untuk membuat suatu keputusan atau kebijakan secara kompetitif dalam rangka memperoleh suara dari rakyat.

. Demokrasi saat ini merupakan bentuk pemerintahan yang paling banyak dianut di seluruh dunia. Demokrasi sendiri bukanlah bentuk baru pemerintahan yang ada di dunia, namun penganutnya tetap banyak. Hadirnya demokrasi telah menjadi hal yang sangat berarti dan nyata untuk mengatasi masalah sosial politik di berbagai negara. Terdapat tiga hal utama dalam substansi demokrasi politik yakni kompetisi, partisipasi, dan kebebasan politik dan sipil. Kompetisi sendiri terjadi secara luas antara individu dan kelompok organisasi serta seluruh kekuasaan pemerintah, dalam jangka waktu teratur dan tidak menggunakan kekerasan. Partisipasi yang menyeluruh merupakan salah satu faktor menyukseskan suatu kepemimpinan dan dalam pengambilan kebijakan. Sementara kebebasan politik dan sipil, yakni kebebasan dalam berpendapat, pers yang bebas, dan berserikat serta berkumpul yang bertujuan untuk menjamin integritas partisipasi dan kompetisi dalam berpolitik. Ketiga substansi dasar dalam demokrasi tersebut harus diperjuangkan untuk mencapai proses demokratisasi.

Demokrasi harus diikhtiarkan dengan baik oleh aktor-aktor yang berperan mendistribusikan nilai-nilai demokrasi. Ketika, nilai-nilai demokratis tersebut tumbuh dan berkembang maka potensi proses demokratisasi mulai berjalan. Perlu disadari bahwa untuk mencapai negara yang demokratis bukanlah hal yang mudah. Banyak tahapan yang harus dijalani dan tidak sedikit pula yang menentang. Apalagi perkembangan demokrasi di negara-negara yang berawal dari pemerintahan yang otoriter lalu beralih ke demokrasi yang lebih liberal.

Demokratisasi tumbuh dengan diawali proses revolusi atas pemerintahan yang sifatnya diktator dan mengalami transisi menuju konsolidasi. Demokratisasi berarti adanya proses perubahan wacana identitas dalam struktur masyarakat dan anggota masyarakat yang lain, dapat berperan dalam kehidupan politiknya. Proses demokratisasi dapat diartikan sebagai tahapan transisi dari pemerintahan yang otoriter atau kepemimpinan yang diktator menuju ke pemerintahan yang lebih demokratis. Konteks transisi dalam hal ini merujuk pada regenerasi politik dan sistemnya. Hal itu bermakna, semua anggota masyarakat yang sudah dewasa memiliki kesempatan untuk berperan dalam penyelenggaraan negara. Selain itu, transisi juga proses yang mengarah pada berbagai bentuk perubahan dalam tatanan masyarakat dan dari nilai-nilai yang lama ke nilai-nilai baru.

Perlu diketahui bahwa kata demokratisasi tidak dapat dipisahkan begitu saja dari kata demokrasi. Kedua konsep ini saling berkaitan satu sama lain. Hal ini merujuk pada pengertian dari demokratisasi yang merupakan suatu proses perubahan menuju ke sistem yang lebih demokratis. Bukan hanya itu, tujuan dari demokratisasi juga memiliki kaitan dengan konsep demokrasi, yakni menanamkan dan menegakkan nilai-nilai yang ada di demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan berpolitik.

Demokratisasi tidak hanya mensyaratkan penggalangan kekuatan, akan tetapi juga pencurahan kecerdasan. Penggalangan kekuatan itu harus dilakukan secara kolektif dan bersamaan dengan pencurahan kecerdasan. Dalam artian, proses demokratisasi sendiri tidak hanya membutuhkan perjuangan dari aktor yang terlibat, namun juga perlu adanya kecerdasan intelektual dalam penerapannya. Penanaman nilai-nilai demokrasi yang menjadi tujuan proses demokratisasi, tidak akan berhasil begitu saja, tanpa adanya keterlibatan intelektual atau kecerdasan di dalamnya.

METODE PENELITIAN

Dalam jurnal artikel ini, metode penelitian yang digunakan oleh tim penulis adalah metode penelitian kualitatif. Jenis data yang diperoleh dalam jurnal artikel ini adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh tim penulis adalah studi pustaka. Studi pustaka menggunakan sumber yang berasal dari buku, jurnal daring, serta berita daring untuk menemukan teori yang relevan dalam penulisan jurnal serta mengetahui perkembangan kasus kudeta di Myanmar yang masih terjadi hingga saat ini. Alur analisis jurnal terdiri atas proses reduksi data yang didapat melalui beragam sumber data, penyajian data yang dituangkan pada tiap bab, serta penarikan kesimpulan yang terdapat di bagian akhir jurnal.

PEMBAHASAN

Kekuasaan Junta Militer Myanmar 1962-1988

Pada tahun 1962, Jenderal Ne Win menggulingkan pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri U Nu. Pemerintahan di bawah kekuasaan Perdana Menteri U Nu telah berlangsung selama kurang lebih 14 tahun sejak Myanmar merdeka dari penjajahan Inggris. Pada tanggal 30 April 1962, Jenderal Ne Win memperkenalkan ideologi "*Burmese Way to Socialism*" melalui saluran radio setempat. Ideologi tersebut memadukan ajaran antara Buddha, Nasionalisme, serta Marxisme. Pemerintahan yang awalnya berbentuk *Constitutional Democracy*, di bawah naungan Ne Win, Burma berubah menjadi negara dengan Sistem *Direct Military Rule*.

Jenderal Ne Win membentuk *Revolutionary Council* atau Dewan Revolusioner yang beranggotakan perwira militer senior yang loyal terhadap Ne Win. Konstitusi sebelumnya yakni Konstitusi Demokrasi diberhentikan oleh militer. Dewan Negara serta parlemen periode U Nu pun ikut dibubarkan. Dalam Sistem *Direct Military Rule*, militer tentu saja menjadi pemegang otoritas tertinggi di Negara Burma. Ne Win juga memberlakukan sistem *one party state*, di mana hanya ada satu partai politik yang boleh berlaku dan beroperasi di Burma. Partai tersebut bernama BSPP atau Burma *Socialist Programme Party*.

Pemerintah juga melarang adanya pembentukan partai politik yang baru, pergerakan partai politik serta serikat pekerja di Burma. Apabila masyarakat memberontak, melakukan perlawanan baik dalam bentuk demonstrasi maupun gerilya, akan segera ditumpas secara brutal oleh militer. Dalam naungan Jenderal Ne Win, Burma diisolasi dari dunia politik internasional. Ne Win membatasi visa pengunjung yang hanya berlaku selama dua puluh empat jam. Ne Win juga menerapkan kebijakan seperti menasionalisasikan beragam sektor yang awalnya dimiliki oleh swasta seperti perusahaan asuransi, bank, pertambangan, hingga institusi pendidikan.

Kepemilikan yang mayoritas dimiliki oleh orang-orang dengan latar belakang ras China serta India, dialihkan oleh militer kepada penduduk pribumi. Ne Win juga mengusir akademisi asing, diplomat negara lain, dan yayasan internasional lainnya dari ibu kota. Devi (2017:47) menyatakan bahwa pada bulan Maret 1964, Ne Win melakukan demonetisasi 50 kyat dan 100 kyat yang menyebabkan dampak ekonomi yang signifikan terhadap masyarakat Burma. Perekonomian negara Burma jelas terdampak hingga mulai bermunculan pasar-pasar gelap. Korupsi dalam jajaran militer semakin menjalar.

Keadaan yang serba kacau ini tentu menuai protes dari masyarakat. Pada tahun 1967, Pemerintah mulai membebaskan tahanan-tahanan politik, salah satunya adalah mantan Perdana Menteri Burma U Nu. Pada bulan April 1972, Ne Win mengeluarkan pernyataan resmi di mana Pemerintahan Revolusioner dibubarkan. Pada tahun 1974, Ne Win mengizinkan adanya konstitusi baru, terselenggaranya pemilihan umum, serta membubarkan *Revolutionary Council*. Konstitusi baru yang dibentuk oleh Ne Win bernama *New Basic Law Constitution*. Pemerintah atau militer memang berjanji untuk melimpahkan kekuasaan kepada calon yang terpilih, namun kekuasaan

pada akhirnya tetap dilimpahkan kepada Ne Win. Perbedaan hanya terdapat pada pangkat yang dibawa Ne Win, yakni dari Jenderal Ne Win menjadi U Ne Win.

Pada tahun 1975, kelompok minoritas di Burma membentuk Front Demokratik Nasional dan melakukan pemberontakan secara gerilya. Pada tahun 1987, Burma mengalami devaluasi mata uang. Pemerintah melegalkan uang kertas 45 kyat serta 90 kyat. Keadaan ini tentu saja membuat rakyat semakin memberontak kepada pemerintah. Demonstrasi yang awalnya dilakukan oleh kelompok minoritas, masyarakat sipil, dan mahasiswa, pada akhirnya diikuti pula oleh para biksu. Puncaknya adalah pada tahun 1988 tepatnya pada bulan Juli, U Ne Win akhirnya turun dari jabatan Perdana Menteri dan melimpahkan jabatannya kepada Jenderal Sein Lwin.

Masyarakat tidak tinggal diam terhadap kebijakan yang diterapkan Ne Win karena Sein Lwin termasuk dalam jajaran militer yang menumpas habis demonstran pada tahun 1962. Masyarakat melakukan demo yang dikenal sebagai "*8888 Uprising*". Peristiwa tersebut dinamakan 8888 Uprising karena diselenggarakan pada tanggal 8 Agustus 1988. Ribuan orang tewas ditumpas habis oleh *Tatmadaw* atau angkatan militer Myanmar. Di tengah penumpasan tersebut, pada tanggal 26 Agustus 1988, Au San Suu Kyi berdiri di luar Pagoda *Shwedagon* melakukan orasi di depan para demonstran tentang kebutuhan mendesak negara untuk segera beralih ke pemerintahan demokrasi setelah bertahun-tahun gagal melaksanakan "*Burmese Way to Socialism*".

Sein Lwin pun akhirnya mundur dari jabatan pada tanggal 12 Agustus 1988 dan posisi Perdana Menteri akhirnya digantikan oleh Dr. Maung Maung. Pada rezim ini, Maung membebaskan tahanan politik, mengizinkan kembali beroperasinya partai politik selain BSPP. Demonstrasi serta pemberontakan tetap berjalan meskipun Maung telah mencoba mengubah kondisi sosial serta politik masyarakat. Militer yang melihat kondisi yang serba ricuh ini tidak tinggal diam dan akhirnya pada tanggal 18 September 1988, kekuatan militer kembali dikerahkan atas komando dari Jenderal Saw Maung untuk melakukan kudeta pemerintahan. Jenderal Saw Maung mendirikan SLORC atau Dewan Pemulihan Hukum dan Ketertiban Negara untuk mengatur tatanan sosial negara. Rezim ini nantinya berkuasa selama kurang lebih 21 tahun lamanya.

PROSES DEMOKRATISASI MYANMAR 1990-2010

Sejarah politik Myanmar memang tidaklah mudah. Apalagi sejak kudeta yang dilakukan oleh Junta Militer pada tahun 1962. Militer yang menguasai pemerintahan terus menancapkan kekuasaannya kian dalam. Hingga tanpa mereka sadari, hal itu membuat warganya sendiri tertindas. Tidak dapat dipungkiri *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) dan negara-negara anggotanya menjadi faktor utama yang mendorong proses demokratisasi Myanmar.

saat banyak negara mulai mengembangkan sistem demokrasinya, justru Myanmar malah terjerumus pada sistem pemerintahan yang otoriter. Nampaknya, pengalaman pahit yang dirasakan masyarakat Myanmar bukan hanya terjerumus dan terkurung dalam sistem pemerintahan otoriter, tetapi juga mendapatkan sanksi politik dan ekonomi dari komunitas internasional. Maraknya protes dan demonstrasi yang terjadi, semua itu menuntut Myanmar berubah menjadi negara demokrasi. Rezim Junta Militer mulai didesak oleh berbagai pihak, baik aktivis pro-demokrasi, etnis minoritas yang mengalami penekanan, hingga masyarakat sipil yang menuntut kebebasan dan kesejahteraan. Berbagai upaya proses demokratisasi terjadi beberapa kali selama Junta Militer berkuasa. Dari beberapa upaya untuk mencapai demokrasi tersebut, proses yang paling besar dan mendapat sorotan publik salah satunya pada tahun 1990. Penyelenggaraan Pemilu pada tahun 1990, setelah selama 30 tahun tidak dilaksanakan, ternyata digunakan junta militer sebagai "*test case*" terhadap sikap masyarakat ke pemerintah.

Sejak rezim junta militer di Myanmar berkuasa banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, puncaknya pada tahun 1988 terjadi kekacauan dalam pengelolaan ekonomi dan politik. Hal ini menyebabkan demonstrasi-demonstrasi mulai dilakukan dan meluas. Pada peristiwa tersebut, ratusan pendemo dibantai oleh pasukan keamanan, kemudian pemerintah militer membentuk "Dewan Restorasi Penegakan Hukum Negara" (SLORC-*State Law Order Restoration Council*). Namun, pembentukan SLORC ternyata tetap tidak memberikan rasa aman bagi rakyat, sikap-sikap pemerintah militer masih saja menekan aktivis pro-demokrasi.

Pada tahun 1989, SLORC mendeklarasikan Hukum Darurat Militer setelah berbagai aksi protes semakin meluas. SLORC merubah nama resmi Negara dari "Burma Bersatu" menjadi "Myanmar Bersatu" pada tahun 1989 dan mengadakan pemilu untuk melegitimasi kekuasaan yang bertujuan untuk bisa memberikan kesan kepada masyarakat internasional bahwa Myanmar ingin memulai kehidupan bernegaranya dengan sesuatu yang baru dan demokratis. Pemilu pada akhirnya diputuskan akan berlangsung pada bulan Mei 1990 dan menjelang penyelenggaraan pemilu tersebut kurang lebih 200 partai politik melakukan registrasi termasuk partai oposisi Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (*the National League for Democracy/NLD*) yang dipimpin Aung San Suu Kyi. NLD berhasil memperoleh dukungan dari masyarakat dan memenangkan pemilu pada tahun 1990. Kemenangan ini tentu saja sebagai tanda bahwa begitu besar keinginan masyarakat untuk perubahan dan kebebasan demokrasi. NLD dan Aung San Suu Kyi pada khususnya telah memperoleh dukungan moral yang tinggi. Dukungan tidak datang dari dalam negeri saja melainkan dari luar negeri. Dukungan tersebut sebagai upaya untuk memperjuangkan demokrasi di Myanmar.

Pemerintahan militer Myanmar sama sekali tidak menduga bahwa partai yang didukungnya akan kalah dalam pemilu ini. Kekuatan NLD sebagai pihak oposisi membuat pemerintahan militer mencari cara alternatif untuk meredakan euforia demokrasi rakyat. Mereka menolak mengakui hasil pemilu dan memberikan hukuman jangka panjang terhadap anggota parlemen yang berasal dari partai NLD. Junta militer juga mengasingkan dan menahan beberapa anggota partai termasuk Aung San Suu Kyi. Pembatalan pemilu tahun 1990 di Myanmar ini langsung menjadi isu internasional dan mendapat kecaman dari banyak pihak. Pemilu yang hanya sebagai "*test case*" terhadap masyarakat, langsung diboikot begitu saja. Sejak saat itu pula, perlakuan junta militer kepada masyarakat sipil semakin brutal.

Pemerintahan Myanmar pada 30 Agustus 2003 mulai menerapkan sistem demokrasi di negaranya. Langkah awal yang diambil oleh pemerintah yakni melalui sebuah kebijakan bernama *Seven Steps Roadmap to Discipline-Flourishing Democracy* yang merupakan program politik yang disampaikan oleh Khin Nyut sebagai Perdana Menteri. Ketujuh langkah dalam menciptakan pemerintahan demokratis tersebut yakni, (i) kembali mengadakan konvensi nasional yang telah diberhentikan sejak tahun 1996, (ii) setelah konvensi nasional ini sukses diadakan maka pemerintah akan menerapkan langkah demi langkah proses yang diperlukan untuk diadakannya sistem demokrasi yang sejati dan disiplin, (iii) dilakukan penyusunan konstitusi baru yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip dasar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dihasilkan oleh konvensi nasional, (iv) konstitusi baru tersebut diadopsi sebagai awal dari referendum nasional, (v) mengadakan pemilihan legislatif yang bebas dan adil sesuai dengan konstitusi baru, (vi) pemerintah akan mengadakan rapat *Hluttaws* sesuai dengan konstitusi baru, (vii) membangun negara modern, maju dan demokratis yang dipimpin oleh seorang kepala negara yang dipilih oleh *Hluttaw* yang didukung oleh pemerintah dan organ penting lainnya yang juga akan dibentuk oleh *Hluttaw* tersebut.

Disciplined democracy dianggap sebagai suatu bentuk upaya rezim militer untuk memperkuat kontrol di pemerintahan. Bila dilihat dalam dunia militer, pendisiplinan adalah suatu bentuk umum untuk mengontrol keteraturan dan anggota. Di sisi lain, demokrasi memberikan kebebasan fundamental dan hak-hak dasar bagi masyarakat. Oleh karena itu, "*disciplined democracy*" di Myanmar dapat diartikan bahwa kebebasan fundamental dan hak-hak dasar masyarakat Myanmar akan berada di bawah kontrol pemerintah, yakni militer.

DEMOKRASI MYANMAR 2010-2021

Wacana akan menerapkan sistem demokrasi nyatanya direalisasikan melalui pemilihan umum yang dilaksanakan pada November 2010. Walaupun berhasil dilaksanakan, terdapat banyak keraguan terhadap proses persiapan dan hasil yang akan didapatkan setelah dilangsungkannya pemilu, hal ini bukan tanpa dasar mengingat pada pemilu yang diselenggarakan pada tahun 1990 pihak pemerintah yang berkuasa membatalkan hasil pemilu secara sepihak. Pembatalan hasil pemilu secara sepihak kemudian menumbuhkan spekulasi di masyarakat bahwa demokrasi di Myanmar sulit untuk direalisasikan.

Sebelum melangsungkan Pemilu, pemerintahan junta merilis lima undang - undang yang berisi, undang – undang pembentukan Komisi Pemilihan Serikat (KPS), undang - undang Pendaftaran Partai Politik untuk berpartisipasi dalam Pemilu, Undang - undang tentang pemilihan anggota *Amyotha Hluttaw*, dan Undang - undang tentang pemilihan anggota *Hluttaws* di tingkat nasional dan regional. Lima Undang - undang yang dikeluarkan ini mengundang kritik sebab dinilai merugikan pihak oposisi. Aturan seperti larangan bagi pemuka agama atau anggota ordo keagamaan tertentu dan orang yang pernah menjalani masa tahanan untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, serta periode pendaftaran nama calon kandidat yang relatif singkat dengan biaya yang cukup tinggi yaitu 500.000 Kyat dinilai dibuat untuk mempersempit kemungkinan pihak oposisi pemerintahan junta untuk masuk ke dalam arena Pemilu 2010. Aturan Konstitusi 2008 juga melarang anggota militer aktif dan warga negara Myanmar yang menikah dengan warga negara asing untuk mendaftarkan diri ke dalam pemilihan umum yang akan dilaksanakan. Apabila diamati, aturan – aturan tersebut paling merugikan partai NLD yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, yang memiliki suami berkewarganegaraan Inggris, sebab ia masih dalam status sebagai tahanan rumah sampai seminggu setelah Pemilu berlangsung.

Proses kampanye menuju Pemilu dilaksanakan di bawah pengawasan ketat pemerintahan militer. Kampanye yang dimulai pada 24 September 2010 sampai 31 Oktober 2010 memperbolehkan partai politik untuk melakukan kampanye di televisi atau pun radio nasional serta melakukan kampanye langsung di wilayah- wilayah Myanmar. Kampanye dilakukan di bawah pengawasan yang ketat, sebelum melakukan kampanye partai politik (parpol) harus terlebih dahulu mengirimkan naskah pidato dan harus disetujui oleh KPS dengan pertimbangan agar kampanye tidak mengancam keamanan negara. Walaupun memiliki kesempatan yang sama untuk berkampanye, nampak keberpihakan KPS terhadap parpol tertentu yang memiliki latar belakang militer. Pengamanan yang dilakukan kepada partai oposisi jauh lebih ketat, bahkan pihak berwajib dilaporkan melakukan tindak kekerasan kepada masyarakat yang terlibat pada kampanye oposisi.

Dalam Pemilu 2010 terdapat 37 partai politik dan 82 independen yang terdaftar untuk mencalonkan diri menjadi anggota perlemen. Partai – partai yang terdaftar memiliki berbagai macam latar belakang mulai dari latar belakang etnis atau ras, kelompok pemuda, dan parpol hasil bentukan rezim militer yang pro-rezim. Terdapat lebih dari 20 parpol yang berlatar belakang etnis seperti *Kayin's People Party*, *Rakhine State National Force of Myanmar*, dan "*Wa*" *National Unity Party*. Mayoritas parpol menggunakan kata demokrasi dan pembangunan nasional dalam penamaan parpolnya, penggunaan kedua kata tadi nampaknya untuk memberikan penekanan

bahwa visi yang diusung parpol adalah untuk membawa perubahan yang sudah lama dinantikan oleh masyarakat Myanmar. Dari 37 partai terdapat beberapa partai yang paling menonjol seperti Union Solidarity and Development Party (USDP) yang tercatat mengirimkan lebih dari 1.100 anggota partai untuk mencalonkan diri pada Pemilu 2010, USDP sendiri memiliki kedekatan dengan pihak militer dan banyak yang memperkirakan bahwa USDP akan memimpin dalam perolehan suara sebab tidak memiliki lawan yang sama kuatnya setelah National League for Democracy (NLD) tidak dapat ikut serta dalam Pemilu 2010 karena aturan yang berlaku.

Ketidak-ikut sertaan NLD dalam Pemilu 2010 kemudian menghasilkan pernyataan resmi berupa boikot terhadap Pemilu 2010 yang dinilai tidak adil. NLD bahkan melakukan kampanye nasional untuk mengedukasi masyarakat atas hak yang dimiliki seperti tidak menggunakan hak suara untuk memilih. Boikot terhadap Pemilu 2010 juga dilakukan oleh beberapa pihak lain seperti kelompok pemuda yang umumnya pelajar dengan cara menyebarkan pamflet yang berisi ajakan untuk tidak mengikuti Pemilu yang tidak adil kepada masyarakat umum. Boikot terhadap Pemilu 2010 juga datang dari dunia Internasional, European Parliament mendesak pemerintah militer Myanmar untuk menyelenggarakan Pemilu yang adil dan transparan sebab aturan yang dibuat sama sekali tidak mencerminkan kedua hal tersebut. Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki Moon, pada 13 Agustus 2010 mengharapkan agar pemerintah militer dapat menghormati dan menunjukkan komitmennya dalam menjalankan pemilu yang inklusif, adil, dan bebas agar dapat mewujudkan perdamaian, demokrasi, dan pembangunan untuk Myanmar.

Meski menerima banyak kritik dari dalam dan luar negeri, Pemilu 2010 tetap dijalankan sesuai dengan rencana pemerintah yaitu pada tanggal 7 November 2010. Menurut data *Inter – Parliamentary Union* (2013) dari total 29 juta pemilih yang terdaftar sebanyak 22 juta orang atau 77.26% pemilih tercatat menggunakan hak suaranya. Seperti yang sudah diperkirakan, USDP memenangkan kursi paling banyak yaitu 259 dari 326 kursi. Pada 4 Februari 2011 melalui proses pemilihan presiden, Thein Sein dari partai USDP terpilih sebagai Presiden Myanmar. Presiden Thein Sein kemudian membentuk kabinet pemerintahan yang mayoritas diisi oleh mereka yang memiliki latar belakang militer, tercatat hanya 4 menteri yang memiliki latar belakang masyarakat sipil. Hasil pemilu ini membuktikan bahwa pengaruh pemerintahan junta masih teramat kuat.

Walaupun diadakan secara terbuka untuk seluruh masyarakat Myanmar, dapat dipahami bahwa Pemilu 2010 dilaksanakan di bawah pengaruh pemerintahan junta yang amat kuat. Peraturan yang dibuat untuk mengatur pemilu nyatanya merugikan dalam berbagai aspek khususnya bagi pihak oposisi. Hasil pemilu yang dirasa tidak adil pun tidak dapat diganggu gugat karena memiliki kekuatan militer yang teramat kuat.

Desakan dunia internasional kepada Myanmar masih santer diserukan, beberapa negara seperti Amerika Serikat memberlakukan sanksi ekonomi atas represi yang dilakukan kepada pihak oposisi dan meminta pemerintah Myanmar untuk segera membebaskan tahanan politik. Berada dalam kondisi yang cukup terdesak, pemerintahan Thein Sein akhirnya membebaskan sejumlah tahanan politik melalui amnesti. Pembebasan tahanan politik memberikan harapan akan kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi, walaupun dunia internasional menilai pemberian amnesti kepada tahanan politik yang dilakukan pemerintah Myanmar hanya untuk meredam

desakan dan sanksi yang diberikan dunia Barat kepada Myanmar. Diluar dugaan, pemerintahan Thein Sein melakukan pertemuan tertutup dengan tokoh oposisi dan aktivis demokrasi terkemuka Aung San Suu Kyi. Pertemuan yang dilakukan di Istana Kepresidenan diperkirakan dilakukan untuk merangkul pihak lawan politik pemerintahan agar dapat bekerja sama dengan pemerintahan dalam mengembangkan demokrasi.

Pada November 2011, setelah pemerintah menghapuskan beberapa pertauran pemilu, NLD menyatakan kesiapannya untuk mendaftarkan diri secara resmi. Kembalinya NLD pada arena politik Myanmar memberikan harapan atas kehidupan demokrasi juga memberikan angin segar pada negara Barat. Pada Pemilu Sela 2012, proses kampanye yang dijalankan tidak jauh berbeda dengan Pemilu 2010 namun pada tahun 2012 pemerintah Myanmar memperbolehkan pihak pemerintah atau organisasi dan media asing untuk mengamati pemilu secara langsung. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk membuka diri terhadap dunia. Pada pemilu ini perhatian terfokus kepada NLD dan Aung San Suu Kyi. NLD menyapu bersih 43 dari 44 kursi yang diperebutkan.

Dominasi NLD pada Pemilu Sela 2012 nyatanya bukan hal yang sementara. Pada Pemilu 2015 dan 2020 NLD kembali membuktikan kekuatannya dengan memenangkan suara terbanyak pada dua pemilu berturut – turut. Kemenangan pada pemilu 2015 juga diharapkan dapat menjadi pembuktian NLD untuk membawa Myanmar menjadi negara yang lebih stabil secara politik dan ekonomi, namun hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan melihat masih banyak terjadi konflik di daerah perbatasan yang sulit diselesaikan dan situasi ekonomi yang masih berusaha mempertahankan posisi aman. Pemilu 2020 yang kembali dimenangkan oleh NLD mendapatkan gugatan dari pihak junta yang mencurigai adanya kecurangan, tudingan ini kemudian dibantah oleh NLD. Awal tahun 2021, militer di bawah pimpinan Jenderal Min Aung melakukan penerobosan ke Istana Kepresidenan dan kemudian menahan Presiden Win Myint serta Aung San Suu Kyi. Peristiwa ini menjadi awal babak baru dalam kehidupan demokrasi Myanmar yang kembali mengalami hambatan.

ANALISA KUDETA MILITER MYANMAR ERA MODERN DAN LUNTURNYA PENEGAKAN DEMOKRASI

Hasil pemilu pada November 2020 lalu dinilai curang oleh Junta Militer Myanmar. Junta Militer dapat dengan mudah melakukan interupsi terhadap pemerintahan resmi yang merupakan hasil pilihan rakyat, hal ini terjadi karena pengaruh militer yang masih kuat. Pemerintahan berbasis militer yang berkuasa sejak awal kemerdekaan Myanmar, ditambah dengan pengalaman pahit kudeta yang terjadi tahun 1962, seakan membuat pengaruh militer sangat kuat di Myanmar. Demokratisasi Myanmar pada tahun 2011, ternyata tidak menjamin berlangsungnya pemerintahan yang demokratis di sana.

Pada Senin, 1 Februari 2021, sebagai pemenang pemilu pada tahun 2020 lalu, Aung San Suu Kyi dan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) seharusnya sudah memulai masa jabatan untuk kedua kalinya. Lima tahun belakangan, Negara Seribu Pagoda sudah menerapkan sistem pemerintahan demokratis di bawah Aung San Suu Kyi. Namun, pada hari yang sama di mana ia sudah memulai masa jabatannya, militer Myanmar mengambil alih pemerintahan dan menjadikan Suu Kyi dan pejabat pendukung sebagai tahanan rumah. Seakan merasakan dejavu masyarakat Myanmar langsung bertindak yang memprotes kudeta tersebut.

Seperti yang sudah disebutkan di awal, militer mengklaim bahwa telah terjadi kecurangan dalam proses pemilu tahun lalu. Militer menyerahkan kekuasaan kepada Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing dan menyatakan keadaan darurat selama satu tahun. Pasal 417 dalam konstitusi negara membenarkan kudeta Min Aung Hlaing, karena mengizinkan militer merebut kekuasaan dalam situasi darurat atau ketika kedaulatan negara sedang terancam. Kali ini, militer menggugat hasil perhitungan suara dan menuduh Komisi Pemilihan Umum. Namun, tuduhan itu langsung ditepis oleh Komisi Pemilihan Umum. Militer juga melayangkan gugatan ke Mahkamah Agung, tetapi masih ditangguhkan. Pemerintah juga dianggap gagal dalam penyelenggaraan Pemilu yang justru dilaksanakan saat pandemi Covid-19. Masyarakat sipil umumnya menolak campur tangan junta ke dalam pemerintahan dan mendesak agar junta segera mengembalikan pemerintahan kepada presiden terpilih. Situasi semakin parah, militer dan kepolisian semakin agresif dalam menertibkan unjuk rasa.

Banyak pihak bertanya-tanya mengapa kudeta bisa terjadi di era demokrasi saat ini? Bila melihat sistem pemerintahan sipil dan militer yang berdampingan di Myanmar, hal tersebut sangat mungkin terjadi. Walaupun, pada tahun 2011 Myanmar sudah mulai untuk menerapkan sistem pemerintahan demokratis, namun keberadaan militer belum sepenuhnya hilang. Kekuasaan sipil-militer sepakat saling berbagi kekuasaan berdasarkan konstitusi 2008. Kesepakatan itu memberikan 25% kursi untuk militer di parlemen dan memperbolehkan untuk memilih menteri-menteri urusan pertahanan dan dalam negeri. Militer yang kini tetap memegang berbagai jabatan penting di pemerintahan, membuat kekuasaan mereka tetap berjalan lancar meskipun negara sudah berbentuk demokrasi. Demokrasi Myanmar baru dapat berjalan dengan semestinya apabila pemerintahan bersedia membangun konsesi dengan militer. Selain itu, pemilu demokratis yang dilaksanakan secara tidak langsung alias dipilih oleh parlemen yang masih dihuni oleh kekuatan militer, dinilai menjadi salah satu faktor mengapa kudeta masih bisa terjadi. Militer yang memiliki

mandat untuk menjadi penasihat sebagai parlemen, mengambil langkah dengan mengalihkan kekuasaan setelah menganggap adanya kecurangan dalam pemilu.

Aung San Suu Kyi yang sangat berpikiran liberal, menginginkan keberadaan militer sepenuhnya hilang di pemerintahan Myanmar. Namun, hal tersebut justru mengakibatkan dirinya tidak sepenuhnya berhasil dalam politik domestik, salah satunya Rohingya. Pihak oposisi junta yang terbagi - bagi ke dalam banyak kubu juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sulit untuk menjatuhkan junta. Aktor-aktor dari rezim terdahulu yang masih berdiri tegak di pemerintahan menjadi salah satu tanda bahwa militer terus mencoba memegang kekuasaan.

Kudeta Militer ini sebagai tanda mulai lunturnya penegakan demokrasi di Myanmar. Demokrasi di Myanmar tidak mencerminkan kehidupan yang demokratis itu sendiri. Serangkaian peristiwa yang telah terjadi di Myanmar sejak tahun 1962 hingga saat ini, tidak sesuai dengan empat pilar utama demokrasi yakni sistem pemilihan yang bebas dan adil, partisipasi aktif dari masyarakat baik di politik praktis serta kehidupan sebagai warga negara, terdapat perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk setiap warga negara, dan regulasi yang berlaku untuk semua kalangan dalam masyarakat. Proses demokratisasi yang dinilai cacat dan mengakibatkan demokrasi tidak sepenuhnya berhasil dijalankan. Apalagi ditambah dengan kudeta militer yang disebut sebagai cara kuno untuk melemahkan demokrasi. Militer bisa saja menjadikan Pemilu sebagai upaya yang lebih modern untuk mengambil kekuasaan, dengan harapan rakyat berpihak pada mereka setelah masalah etnis minoritas yang menjadi momok bagi Myanmar. Beberapa etnis minoritas saja tidak dilibatkan dalam pemilihan umum.

KESIMPULAN

Berada di bawah pemerintahan otoriter dalam waktu yang lama menyebabkan masyarakat Myanmar mendambakan kehidupan yang berdemokrasi. Pemerintahan Junta yang memegang kekuasaan penuh melihat bahwa kehadiran demokrasi adalah sebuah ancaman yang perlu diawasi. Upaya menggagalkan kehidupan demokrasi dinyatakan saat Junta membatalkan hasil Pemilu 1990. Keadaan tersebut bertahan dalam periode yang cukup lama sampai akhirnya pada tahun 2012 Pemerintah Junta terlihat mulai melonggarkan cengkramannya dan memberikan ruang bagi demokrasi, pendekatan kepada tokoh-tokoh oposisi, membuka diri terhadap dunia internasional mulai dilakukan sampai akhirnya pada Pemilu 2015, NLD dapat mendominasi politik Myanmar. Hal ini membawa angin segar bagi masyarakat yang telah lama mendambakan demokrasi. Di bawah kepemimpinan yang lebih demokratis, Myanmar perlahan menunjukkan perubahan dan kemajuan walaupun tidak signifikan.

Kudeta yang kembali dilakukan oleh militer pada awal 2021 merupakan hal yang mengejutkan dan disayangkan karena merupakan bentuk pelecehan demokrasi. Masyarakat sipil yang menolak kudeta melakukan perlawanan melalui aksi unjuk rasa yang menyebabkan korban dari pihak sipil. Melihat perkembangan kasus pengambil-alihan kekuasaan oleh Junta nampaknya akan sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan kembali kekuasaan pemerintahan terpilih,

kecaman masyarakat baik domestik maupun internasional terhadap kekerasan yang terjadi seakan tidak berarti apa-apa. Walaupun terdapat sanksi yang mulai dijatuhkan terhadap Myanmar akibat kudeta, minimnya intervensi langsung pihak internasional menyebabkan pihak junta merasa leluasa. Belajar dari sejarah Junta Myanmar baru akan melonggarkan aturan junta setelah berada dalam posisi yang sangat terdesak karena mendapat sanksi ekonomi dari berbagai pihak yang menyebabkan negara ini mengalami kemunduran ekonomi.

Junta militer merupakan sebuah bukti nyata lunturnya demokrasi bagi negara Myanmar. Mulai dari segi “kehendak rakyat” sebagai sumbernya, “kebaikan bersama” sebagai tujuannya hingga “metode demokratis” dalam seremonial politik, pemerintahan yang ditunggangi oleh militer tidak dapat mencakup unsur-unsur demokrasi itu sendiri. Rezim Aung San Suu Kyi yang telah memperjuangkan demokrasi sejak era Ne Win, selalu dikalahkan oleh oposisi yang memiliki angkatan bersenjata sebagai penyokongnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Huntington, P. Samuel. (1995). *Gelombang Demokrasi Ketiga*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Thuzar, Moe. (2017). *Understanding Democracy, Security and Change in Post-2015 Myanmar*. Education About Asia. 22. 14.

DISERTASI

BATUBARA, P. (2017). *Peran dan Upaya Aung San Suu Kyi dalam Memperjuangkan Demokrasi di Myanmar (Studi : dari masa kekuasaan Junta Militer 1988 hingga tahun 2012)* (Bachelor). UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

JURNAL

Awani, Irewati. (2007). Myanmar dan Matinya Penegakan Demokrasi. *Jurnal Penelitian Politik*. 4 (1). 12.

Devi, K. S. (2017). Myanmar under the Military Rule 1962-1988. *International Research Journal of Social Sciences*, 3(10), 46–50. <http://www.isca.in/IJSS/Archive/v3/i10/8.ISCA-IRJSS-2014-173.php>

HUNTINGTON, S. (2009). How Countries Democratize. *Political Science Quarterly*, 124(1), 31-69. doi: 10.1002/j.1538-165x.2009.tb00641.x

Keling, M. F., & Utara, U. (2010). A Historical Approach to Myanmar's Democratic Process. *Journal of Asia Pacific Studies*, 1(2), 132–148.

Than, T. (2013). MYANMAR'S 2012 BY-ELECTIONS: The Return of NLD. *Southeast Asian Affairs*, 204-219. Diakses pada Maret 31, 2021, from <http://www.jstor.org/stable/23471145>

ARTIKEL LAPORAN

Kivimäki, T., & Rintakoski, K. (2010). Supporting Democratic and Peaceful Change in Burma / Myanmar. October.

Martin, M. (2010). Burma's 2010 Election Campaign: Issues for Congress. Refworld.org. Diakses pada 30 Maret 2021, from <https://www.refworld.org/pdfid/4cc7bf762.pdf>.

WEBSITE

News.bbc.co.uk. Suu Kyi's NLD party to boycott Burma election. Diakses pada 30 Maret 2021, from <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8592365.stm>.

Gnanasagaran, A. 8888 Uprising: 30 years on. Diakses pada 29 Maret 2021, from <https://theaseanpost.com/article/8888-uprising-30-years>

Marshall, S., & Webb, S. Suu Kyi says boycott of Myanmar election an option. U.S. Diakses pada 30 Maret 2021, from <https://www.reuters.com/article/us-myanmar-suukyi-idUSKBN0MU19R20150403>.

Bbc.com. Myanmar profile - Timeline. Diakses pada 29 Maret 2021, from <https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-12992883>

Aljazeera.com. Myanmar Youth Urge Election Boycott. Diakses pada 30 Maret 2021, from <https://www.aljazeera.com/news/2010/11/5/myanmar-youth-urge-election-boycott>.

News.unair.ac.id. Dosen HI UNAIR: Nihilnya Konsesi Pemerintahan Sipil dan Militer Jadi Pemicu Kudeta di Myanmar - Unair News. Diakses pada 2 April 2021, from <http://news.unair.ac.id/2021/02/15/dosen-hi-unair-nihilnya-konsesi-pemerintahan-sipil-dan-militer-jadi-pemicu-kudeta-di-myanmar/>

BBC News Indonesia. Pemilu Burma dimulai. Diakses pada 30 Maret 2021, from https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2010/11/101107_burmaelection.

Union, I. IPU PARLINE database: MYANMAR (Pyithu Hluttaw), ELECTIONS IN 2010. Archive.ipu.org. Diakses pada 30 Maret 2021, from http://archive.ipu.org/parline-e/reports/arc/2388_10.htm.